



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

INSPEKTORAT

**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENGAWASAN
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**

**INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau LPPD merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan melalui Laporan yang mengarah pada penyelenggaraan program-program berkelanjutan, sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau LPPD ini juga merupakan Realisasi dari Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 melalui penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja Tahun 2024 yang juga telah tertuang dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Rote Ndao 2019-2024 dengan mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan kesinambungan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan program Pemerintah Daerah agar kedepannya diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien.

Ba'a, 18 Januari 2025

Inspektur Kabupaten Rote Ndao,



Arkadius H. Lunggu, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650808 199303 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	1
B. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.....	2
C. Nama Perangkat Daerah	2
D. Bidang Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Yang Dilaksanakan.....	2
E. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	3
F. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Rote Ndao	4
BAB II.....	5
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	5
A. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	5
B. Program dan Kegiatan.....	5
C. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.	8
D. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	10
E. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	15
F. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (Lengkap, Kurang, Mencukupi atau lainnya)	16
G. Permasalahan dan Solusi.....	17

BAB III	20
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) ..	20
TAHUN 2024	20
A. Program dan Kegiatan.....	20
B. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	22
C. Permasalahan dan Solusi.....	31
BAB IV	30
TUGAS PEMBANTUAN.....	30
BAB V	31
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	31
A. Kerjasama Antar Daerah.....	31
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	31
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.....	31
BAB VI	32
PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROVINSI.....	32
A. Penghargaan Tingkat Nasional	32
B. Penghargaan Tingkat Provinsi	32
BAB VII	33
PENUTUP	33
A. Kesimpulan	33
B. Saran.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Dasar hukum Pembentukan Perangkat Daerah adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao. Adapun dasar Hukum pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

B. Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat didasarkan pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 38 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 42 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

C. Nama Perangkat Daerah

Perangkat Daerah Merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP 38 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Adalah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.

D. Bidang Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Yang Dilaksanakan

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah fungsi Penunjang pengawasan

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi Penunjang pengawasan dengan memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Inspektorat serta mengadakan hubungan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan fungsi Penunjangpengawasan;
- b. pelaksanaan kebijakan fungsi Penunjangpengawasan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfungsi Penunjangpengawasan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas danfungsinya.

E. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dibentuk Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 42 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, maka Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sekretaris;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Analis Keuangan Pusat/Daerah (Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset; dan
 - Sub Bagian Perencanaan, Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan);
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV;
7. Inspektur Pembantu V;
8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

9. Kelompok Jabatan Fungsional Umum (JFU).

F. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Rote Ndao

Inspektorat Kabupaten Rote Ndao memiliki sumber daya manusia berjumlah 36 orang PNS dan dapat digambarkan melalui Daftar Nominatif pada Inspektorat Kabupaten Rote (data terlampir).

Tabel.1.1
Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil

No	Nama	Jabatan / Golongan Ruang
1.	Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si NIP. 19650808 199303 1 011	Inspektur Pembina Utama Muda, IV/c
2.	Jery E. Haning, SE NIP. 19730701 200501 1 010	Sekretaris Pembina, IV/a
3.	Refly E. S. Therik, SP NIP. 19690905 199903 1 008	Inspektur Pembantu I Pembina Tk. I, IV/b
4.	Swengly Y. B. Pello, SH NIP.19690703 199303 1 010	Inspektur Pembantu II Pembina Tk. I, IV/b
5.	Hereth O. Bella, S.Pd NIP. 19710211 199303 1 004	Inspektur Pembantu III Pembina Tk. I, IV/b
6.	Riana Yulinda Saek, SE NIP. 19740713 200701 2 019	Inspektur Pembantu IV Pembina Tk. I, IV/b
7.	Jeky Kornelis Patola, S.Si NIP. 19831004 201101 1 007	Inspektur Pembantu V Pembina, IV/a
8.	Erwin Nithanael Lau, A.Md NIP. 19760923 201101 1 005	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian Penata Muda Tk. I, III/b
9.	Marcy Deby Katu, S.S, M.Si NIP. 19700331 200312 2 002	Perencana Ahli Muda (Sub. Kordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan) Pembina, IV/a
10.	Robinson Jois Elim, SE NIP. 19750316 200604 1 018	Analisis Keuangan Ahli Muda (Sub Kordinator Keuangan dan Aset) Penata Tk. I, III/d

11.	Abdul Muti, S.IP NIP. 19671118 198903 1 009	Auditor Madya Pembina Tk. I, IV/b
12.	Yessi Lasarus Menno, S.Sos NIP. 19760124 201001 1 012	Auditor Madya Pembina, IV/a
13.	Abdul Rajab, SE NIP. 19740208 200701 1 017	Auditor Madya Pembina, IV/a
14.	Halena J. Lakabela, SE NIP. 19780813 200803 2 001	Pejabat P2UPD Pembina, IV/a
15.	Wisye Roisa O. Boelan, SE NIP. 19801015 200803 2 002	Pejabat P2UPD Penata Tk. I, III/d
16.	Joms Th. Tadde, Se NIP. 19750814 201001 1 014	Auditor Muda Penata Tk. I, III/d
17.	Naomi Nitbani, S.Pt NIP. 19791015 200901 2 002	Auditor Muda Penata Tk. I, III/d
18.	Limit A. Ledoh, S.Sos NIP. 19740405 201001 1 014	Auditor Muda Penata, III/c
19.	Mathasim Hanasin, SH NIP. 19770121 201001 1 028	Auditor Muda Penata, III/c
20.	Messak A. Elimanafe, S.I.P NIP. 19790308 200604 1 019	Auditor Penyelia Penata Tk. I, III/d
21.	Jeanny R. J. Ndolu, SE NIP. 19840120 201001 2 021	Auditor Muda Penata, III/c
22.	Marthen Saudale, SH NIP. 19820312 200604 1 013	Auditor Pertama Penata Muda Tk. I, III/b
23.	Yuli Y. S. Toulasik, SE NIP. 19830704 200312 2 002	Auditor Pertama Penata Muda Tk. I, III/b
24.	Ermys Merly Ndoen, SE NIP. 19850320 202012 1 003	Auditor Pertama Penata Muda, III/a
25.	Anita Sandrawati Boboy, SE NIP. 19850507 202012 2 004	Auditor Pertama Penata Muda, III/a
26.	Yansry Paula Ndolu, SE NIP. 19851230 202012 2 004	Auditor Pertama Penata Muda, III/a
27.	Yofri Yohanis Ballo, SE NIP. 19940730 202012 1 004	Auditor Pertama Penata Muda, III/a
28.	Liansuspirini Amekan, S.Akt NIP. 19950915 202203 2 003	Auditor Pertama Penata Muda, III/a
29.	Patrizia Berlian Aplugi, S, Ak NIP. 19971104 202203 2 007	Auditor Pertama Penata Muda, III/a

30.	Amandus P. B. Ledjab, ST NIP. 19800628 201001 1 012	Pelaksana Penata Tk. I, III/d
31.	Manasye Tadj Mangi, S.I.P NIP. 19800102 200803 1 001	Pelaksana Penata, III/c
32.	David Lobo, S.I.P NIP. 19741210 200312 1 006	Pelaksana Penata Muda, III/a
33.	Dethan A. Soeki NIP. 19680519 200312 1 003	Pelaksana Penata Muda, III/a
34.	Alfa Rellien Ey, S.Tr.I.Pnip. NIP. 20020109 202409 2 001	Pelaksana Penata Muda, III/a
35.	Semuel O. Ndu Ufi NIP. 19791017 201212 1 006	Pelaksana Pengatur, II/c
36.	Hendra S. Panie NIP. 19850428 201406 1 003	Pelaksana Pengatur, II/c

BAB II

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao. Rincian tugas pokok dan fungsi lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 23 tahun 2017 dimana merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur (Pejabat Eselon II/b), berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

B. Program dan Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Rote Ndao melaksanakan Urusan Wajib yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan serta Anggaran dapat dilihat pada tabel 2.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

Tabel 2.1

Program, Kegiatan dan Anggaran

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	SELISIH (BERTAMBAH / BERKURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.969.151.491	3.138.900.987	169.749.496
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.450.000	3.450.000	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.725.000	1.725.000	-

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.725.000	1.725.000	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.736.373.941	2.906.123.437	169.749.496
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.685.733.941	2.855.483.437	169.749.496
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah	50.640.000	50.640.000	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.200.000	4.200.000	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.693.200	5.693.200	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.693.200	5.693.200	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.310.800	105.310.800	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.435.500	2.435.500	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.878.300	18.878.300	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	11.000.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.037.000	66.037.000	-
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.960.000	6.960.000	-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	19.314.000	19.314.000	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	19.314.000	19.314.000	-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	32.477.000	32.477.000	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	906.000	906.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.571.000	31.571.000	-
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.332.550	62.332.550	-

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	50.232.700	50.232.700	-
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.099.850	12.099.850	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	946.718.300	1.006.718.300	60.000.000
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	808.800.500	868.800.500	60.000.000
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	149.458.500	189.458.500	40.000.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	144.034.000	164.034.000	20.000.000
	Reviu Laporan Kinerja	33.150.000	33.150.000	-
	Reviu Laporan Keuangan	150.960.000	150.960.000	-
	Pengawasan Desa	88.535.200	88.535.200	-
	Kerjasama Pengawasan Internal	98.186.000	98.186.000	-
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	144.476.800	144.476.800	-
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	137.917.800	137.917.800	-
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	4.151.000	4.151.000	-
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	133.766.800	133.766.800	-
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	7.500.000	7.500.000	-
1	Pendampingan dan Asistensi	7.500.000	7.500.000	-
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7.500.000	7.500.000	-
TOTAL		3.923.369.791	4.153.119.287	229.749.496

Sumber : Subag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Subag. Keuangan dan Aset Inspektorat Kab.Rote Ndao.

C. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Sumber Daya Manusia Aparatur Inspektorat Kabupaten Rote Ndao yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian berjumlah 36 Orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan aparatur, terdiri dari SLTA sebanyak 3 Orang, DIPLOMA III (D-3) sebanyak 1 orang, STRATA 1 sebanyak 30 orang, STRATA 2 sebanyak 2 orang, seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Daftar Tingkat Pendidikan Aparatur pada Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	-
2	SLTA	3
3	DIPLOMA /D3	1
4	STRATA 1	30
5	STRATA 2	2
6	STRATA 3	-
Jumlah		36

*Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao.*

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi aparatur Inspektorat Kabupaten Rote Ndao belum memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Inspektorat Kabupaten Rote Ndao. Khusus untuk bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan perlu adanya penambahan

aparatur untuk operator yang berlatar belakang IT terkait banyaknya laporan-laporan yang harus dibuat dibagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

Selanjutnya komposisi aparatur berdasarkan golongan seperti yang diuraikan pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Daftar Pangkat dan Golongan Aparatur Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1	Juru Muda/Ia	-
2	Juru Muda TK.I/b	-
3	Juru/Ic	-
4	Juru TK.I/Id	-
5	Pengatur Muda/IIa	-
6	Pengatur Muda TK.I/IIb	-
7	Pengatur/IIc	-
8	Pengatur TK.I/IId	2
9	Penata Muda/IIIa	9
10	Penata Muda TK.I/IIIb	3
11	Penata/IIIc	4
12	Penata TK.I/IIId	6
13	Pembina/Iva	6
14	Pembina TK.I/IVb	5
15	Pembina Utama Muda/IVc	1
16	Pembina Utama Madya/IVd	-
17	Pembina Utama/IVe	-
	JUMLAH	36

*Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao.*

Sebagaimana telah diuraikan pada tabel diatas, tercatat 61,11 % aparatur Inspektorat Kabupaten Rote Ndao adalah golongan III, merupakan pegawai Strata I dan D3.

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Daftar Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional
Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Pejabat Struktural	8
2	Pejabat Fungsional (JFT, Auditor dan P2UPD)	19
Jumlah		27

*Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao.*

D. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Inspektorat Kabupaten Rote Ndao pada tahun anggaran 2024 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp4.153.119.287,00 yang terbagi dalam 3 (tiga) program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan.

Secara keseluruhan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar Rp4.064.852.744,00 atau 98,87 % dari anggaran keuangan sebesar Rp4.153.119.287,00. Pencapaian realisasi fisik pada skala nilai 80>100 kategori penilaian **Baik** dan realisasi keuangan pada skala nilai >80-100 kategori penilaian **Baik**.

Selanjutnya disampaikan realisasi fisik dan keuangan per program dan kegiatan beserta capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp3.138.900.987,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp3.057.613.744,00 dengan persentase 97,41% dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal kedinasan lingkup Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dengan sasaran strategis tersedianya data pegawai, keuangan dan aset. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kualitas layanan internal kedinasan lingkup Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, yang dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 2.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan

N O	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		TARGET	REALISASI	(%)	TARG ET	REALI SASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.138.900.987	3.057.613.744	97,41	100	100	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.450.000	3.450.000	100,00	19	19	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.725.000	1.725.000	100,00	12	12	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.725.000	1.725.000	100,00	7	7	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.906.123.437	2.842.196.744	97,80	36	36	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.855.483.437	2.791.556.744	97,76	12	12	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.640.000	50.640.000	100,00	12	12	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	100,00	2	2	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.200.000	4.200.000	100,00	2	2	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.693.200	5.693.000	100,00	39	39	100

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.693.200	5.693.000	100,00	35	35	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.310.800	105.310.500	100,00	711	346	49
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.435.500	2.435.500	100,00	1	1	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.878.300	18.878.000	100,00	12	12	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	11.000.000	100,00	314	314	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.037.000	66.037.000	100,00	9	9	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.960.000	6.960.000	100,00	4	4	100
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.314.000	19.314.000	100,00	5	5	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.314.000	19.314.000	100,00	4	4	100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.477.000	17.438.000	53,69	24	24	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	906.000	906.000	100,00	12	12	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.571.000	16.532.000	52,36	12	12	100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.332.550	60.011.500	96,28	16	16	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	50.232.700	47.912.500	95,38	11	11	100
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.099.850	12.099.000	99,99	1	1	100

Sumber : Subag.Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat

Kabupaten Rote Ndao, 2024.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan anggaran keuangan sebesar Rp1.006.718.300,00 dapat terealisasi sebesar Rp999.739.000,00 atau persentase mencapai 99,31% dengan

kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini berupa pengawasan internal secara berkala oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan/pengawasan/pembinaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor/Bagian, Kecamatan, Kelurahan dan Desa, melakukan Reviu atas Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan berupa dokumen LKPD, LKIP, RKPD, KUA-PPAS, RKA dan Penyerapan DAK fisik, Kerjasama pengawasan internal dalam bentuk rapat koordinasi pencegahan korupsi, rapat PKPT, koordinasi dengan instansi terkait, pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TL-HP) Inspektorat Provinsi 2 semester, rapat pengawasan, rekonsiliasi data tindak lanjut BPK-RI serta pemutakhiran data tingkat regional serta melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan APIP dalam bentuk pertemuan atau rapat untuk merekonsiliasi perkembangan atau kemajuan tidak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dengan anggaran keuangan sebesar Rp868.800.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp862.420.000,00 atau persentase mencapai 99,27%.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini berupa penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang ditujukan untuk audit/pemeriksaan berdasarkan dari memo/pengaduan pejabat instansi/dinas dan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao serta pelaksanaan koordinasi Saber Pungli untuk menghasilkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dengan anggaran

keuangan sebesar Rp137.917.800,00 dapat terealisasi sebesar Rp137.319.000,00 atau sebesar 99,57%.

Tabel 2.6
Program Penyelenggaraan Pengawasan

NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		TARGET	REALISASI	(%)	TARGET	REALISASI	(%)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.006.718.300	999.739.000	99,31	7	7	100
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	868.800.500	862.420.000	99,27	78	78	100
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	189.458.500	189.458.500	100,00	6	6	100
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	164.034.000	164.034.000	100,00	34	34	100
	Reviu Laporan Kinerja	33.150.000	33.150.000	100,00	2	2	100
	Reviu Laporan Keuangan	150.960.000	150.960.000	100,00	11	11	100
	Pengawasan Desa	88.535.200	88.365.000	99,81	11	11	100
	Kerjasama Pengawasan Internal	98.186.000	97.804.000	99,61	10	10	100
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	144.476.800	138.648.500	95,97	2	2	100
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	137.917.800	137.319.000	99,57	30	30	100
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4.151.000	4.151.000	100,00	10	10	100
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	133.766.800	133.168.000	99,55	20	20	100

Sumber : Subag.Keuangan dan Aset serta Subag.Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, 2024.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan anggaran keuangan sebesar Rp7.500.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp7.500.000,00 atau persentase mencapai 100% dengan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		TARGET	REALISASI	(%)	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	7.500.000	7.500.000	100	70	70	100
1	Pendampingan dan Asistensi	7.500.000	7.500.000	100	1	1	100
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7.500.000	7.500.000	100	1	1	100

Sumber : Subag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat
Kabupaten Rote Ndao, 2024.

E. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan (DPPA Tahun Anggaran 2024) yang dilaksanakan dengan perencanaan pembangunan daerah, untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sudah sesuai dengan program kegiatan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Program RKPD dan Program DPPA

NO	PROGRAM RKPD	PROGRAM DPPA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
3	Program Perumusan, Kebijakan Pendampingan dan	Program Perumusan, Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

F. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (Lengkap, Kurang, Mencukupi atau lainnya)

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao masih kurang tapi keadaan Sarana dan Prasarana yang ada rata-rata masih dalam keadaan baik.

Tabel 2.8
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah Barang	KeadaanBarang (B/KB/RB)
1.	Bangunan Gedung kantor	207 M2	B
2.	Kendaraan Roda 4	1 Unit	B
3	Kendaraan Roda 2	7 Unit	B
4	Laptop	12 Unit	B
5	Komputer PC	4 Unit	B
6	Printer	19 Unit	B
7	Proyektor / Infokus	1 Unit	B
8	AC	6 Unit	B
9	Mesin Ketik	1 Unit	B
10	Alat Pemotong Kertas	1 Unit	B
11	Lemari	41 Unit	B
12	Meja	28 Unit	B
13	Kursi	28 Unit	B
14	Kursi Tamu di ruangan Pimpinan	1 Set	B
15	Sofa	1 Set	B
16	Televisi	1 Unit	B
17	Wireless	1 Unit	B
18	Harddisk external	2 Unit	B
19	UPS	4 Unit	B

20	Handycam	3 Unit	B
21	Server	1 Unit	B

Sumber : Subag. Umum dan Kepegawaian Kabupaten Rote Ndao, 2024.

G. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan.

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun Anggaran 2024 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao. Meskipun ada beberapa kegiatan yang realisasi anggaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dalam menjalankan pelaksanaan program dan kegiatannya antara lain:

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)
Kekuatan Personil atau Sumber daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas masih terbatas. Kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Masih kurangnya aparatur di Sekretariat terutama dibidang IT yang dibutuhkan sebagai operator.
- 3) Belum seimbangnya rasio antara tenaga auditor/pengawas dengan objek pemeriksaan yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang seharusnya berjumlah 42 (empat puluh dua) orang sehingga masih kurang 28 (dua puluh delapan) orang. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berjumlah 2 (dua) orang dari yang seharusnya 10 (sepuluh) orang dan masih dibutuhkan 8 (delapan) orang lagi. Secara keseluruhan tenaga auditor/pengawas masih kurang 36 (tiga puluh enam) orang.
- 4) Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi pengawasan.

5) Kekurangan Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana penunjang pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat saat ini relatif masih terbatas misalnya peralatan untuk pengujian pekerjaan fisik konstruksi, kendaraan operasional pengawasan serta laptop dan printer sebagai penunjang penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

6) Biaya operasional Pengawasan belum terpenuhi sesuai standar.

Belum terpenuhinya anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan yang dikaitkan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah serta anggaran penunjang pengawasan sesuai kebutuhan yang dikaitkan dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga mempengaruhi output/kinerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.

B. Solusi

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao beberapa point yang dijabarkan berikut diharapkan dapat memberi solusi :

- 1) Mengusulkan penambahan pegawai pada Sekretariat khususnya tenaga IT untuk operator yang saat ini belum ada.
- 2) Mengusulkan penambahan pegawai khususnya pejabat fungsional auditor maupun fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sehinggaimbang dengan objek pemeriksaan.
- 3) Merumuskan ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan dimana untuk penambahan aparatur nya juga harus disesuaikan tingkat pendidikannya

dengan kebutuhan yang ada seperti Sarjana Akuntansi dan Teknik Sipil.

- 4) Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana.
- 5) Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan.
- 6) Agar SDM Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menjadi Aparatur yang handal, terampil, kreatif dan inovatif perlu disediakan dana untuk mengikuti diklat teknis sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- 7) Untuk menunjang kelancaran pekerjaan perlu ditambah sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan pemeriksaan.

BAB III
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2024

A. Program dan Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Rote Ndao melaksanakan Urusan Wajib yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan serta Anggaran dapat dilihat pada tabel 2.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program, Kegiatan dan Anggaran

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.969.151.491	3.138.900.987
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.450.000	3.450.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.725.000	1.725.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.725.000	1.725.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.736.373.941	2.906.123.437
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.685.733.941	2.855.483.437
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Daerah	50.640.000	50.640.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.200.000	4.200.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.693.200	5.693.200
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.693.200	5.693.200

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.310.800	105.310.800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.435.500	2.435.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.878.300	18.878.300
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	11.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.037.000	66.037.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.960.000	6.960.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	19.314.000	19.314.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	19.314.000	19.314.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	32.477.000	32.477.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	906.000	906.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.571.000	31.571.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.332.550	62.332.550
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	50.232.700	50.232.700
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.099.850	12.099.850
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	946.718.300	1.006.718.300
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	808.800.500	868.800.500
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	149.458.500	189.458.500
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	144.034.000	164.034.000
	Reviu Laporan Kinerja	33.150.000	33.150.000
	Reviu Laporan Keuangan	150.960.000	150.960.000
	Pengawasan Desa	88.535.200	88.535.200
	Kerjasama Pengawasan Internal	98.186.000	98.186.000

	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	144.476.800	144.476.800
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	137.917.800	137.917.800
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	4.151.000	4.151.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	133.766.800	133.766.800
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	7.500.000	7.500.000
1	Pendampingan dan Asistensi	7.500.000	7.500.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7.500.000	7.500.000
TOTAL		3.923.369.791	4.153.119.287

Sumber : Subag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Subag. Keuangan dan Aset Inspektorat Kab.Rote Ndao.

B. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Inspektorat Kabupaten Rote Ndao pada tahun anggaran 2024 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp4.153.119.287,00 yang terbagi dalam 3 (tiga) program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan.

Secara keseluruhan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan adalah sebesar Rp4.064.852.744,00 atau 98,87 % dari anggaran keuangan sebesar Rp4.153.119.287,00. Pencapaian realisasi fisik pada skala nilai 80>100 kategori penilaian **Baik** dan realisasi keuangan pada skala nilai >80-100 kategori penilaian **Baik**.

Selanjutnya disampaikan realisasi fisik dan keuangan per program dan kegiatan beserta capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan melalui 8 (delapan kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp3.138.900.987,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp3.057.613.744,00 dengan persentase 97,41% dimana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan internal kedinasan lingkup Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dengan sasaran strategis tersedianya data pegawai, keuangan dan aset. Adapun manfaat yang diperoleh yaitu pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kualitas layanan internal kedinasan lingkup Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, yang dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 2.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program Penunjang Urusan Pemerintahan

N O	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		TARGET	REALISASI	(%)	TARG ET	REALI SASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.138.900.987	3.057.613.744	97,41	100	100	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.450.000	3.450.000	100,00	19	19	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.725.000	1.725.000	100,00	12	12	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.725.000	1.725.000	100,00	7	7	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.906.123.437	2.842.196.744	97,80	36	36	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.855.483.437	2.791.556.744	97,76	12	12	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.640.000	50.640.000	100,00	12	12	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.200.000	4.200.000	100,00	2	2	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.200.000	4.200.000	100,00	2	2	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.693.200	5.693.000	100,00	39	39	100

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.693.200	5.693.000	100,00	35	35	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.310.800	105.310.500	100,00	711	346	49
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.435.500	2.435.500	100,00	1	1	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.878.300	18.878.000	100,00	12	12	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	11.000.000	100,00	314	314	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.037.000	66.037.000	100,00	9	9	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.960.000	6.960.000	100,00	4	4	100
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.314.000	19.314.000	100,00	5	5	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.314.000	19.314.000	100,00	4	4	100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.477.000	17.438.000	53,69	24	24	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	906.000	906.000	100,00	12	12	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.571.000	16.532.000	52,36	12	12	100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.332.550	60.011.500	96,28	16	16	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	50.232.700	47.912.500	95,38	11	11	100
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.099.850	12.099.000	99,99	1	1	100

Sumber : Subag.Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat

Kabupaten Rote Ndao, 2024.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan dengan anggaran keuangan sebesar Rp1.006.718.300,00 dapat terealisasi sebesar Rp999.739.000,00 atau persentase mencapai 99,31% dengan

kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini berupa pengawasan internal secara berkala oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan/pengawasan/pembinaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor/Bagian, Kecamatan, Kelurahan dan Desa, melakukan Reviu atas Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan berupa dokumen LKPD, LKIP, RKPD, KUA-PPAS, RKA dan Penyerapan DAK fisik, Kerjasama pengawasan internal dalam bentuk rapat koordinasi pencegahan korupsi, rapat PKPT, koordinasi dengan instansi terkait, pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TL-HP) Inspektorat Provinsi 2 semester, rapat pengawasan, rekonsiliasi data tindak lanjut BPK-RI serta pemutakhiran data tingkat regional serta melakukan monitoring dan evaluasi tindaklanjut pemeriksaan BPK RI dan APIP dalam bentuk pertemuan atau rapat untuk merekonsiliasi perkembangan atau kemajuan tidak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dengan anggaran keuangan sebesar Rp868.800.500,00 dapat terealisasi sebesar Rp862.420.000,00 atau persentase mencapai 99,27%.

d. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini berupa penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang ditujukan untuk audit/pemeriksaan berdasarkan dari memo/pengaduan pejabat instansi/dinas dan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao serta pelaksanaan koordinasi Saber Pungli untuk menghasilkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dengan anggaran

keuangan sebesar Rp137.917.800,00 dapat terealisasi sebesar Rp137.319.000,00 atau sebesar 99,57%.

Tabel 3.3
Program Penyelenggaraan Pengawasan

NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		TARGET	REALISASI	(%)	TARGET	REALISASI	(%)
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.006.718.300	999.739.000	99,31	7	7	100
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	868.800.500	862.420.000	99,27	78	78	100
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	189.458.500	189.458.500	100,00	6	6	100
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	164.034.000	164.034.000	100,00	34	34	100
	Reviu Laporan Kinerja	33.150.000	33.150.000	100,00	2	2	100
	Reviu Laporan Keuangan	150.960.000	150.960.000	100,00	11	11	100
	Pengawasan Desa	88.535.200	88.365.000	99,81	11	11	100
	Kerjasama Pengawasan Internal	98.186.000	97.804.000	99,61	10	10	100
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	144.476.800	138.648.500	95,97	2	2	100
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	137.917.800	137.319.000	99,57	30	30	100
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4.151.000	4.151.000	100,00	10	10	100
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	133.766.800	133.168.000	99,55	20	20	100

Sumber : Subag.Keuangan dan Aset serta Subag.Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, 2024.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan anggaran keuangan sebesar Rp7.500.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp7.500.000,00 atau persentase mencapai 100% dengan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.4**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		TARGET	REALISASI	(%)	TARGET	REALISASI	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	7.500.000	7.500.000	100	70	70	100
1	Pendampingan dan Asistensi	7.500.000	7.500.000	100	1	1	100
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7.500.000	7.500.000	100	1	1	100

Sumber : Subag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat

Kabupaten Rote Ndao, 2024.

C. Permasalahan dan Solusi**A. Permasalahan.**

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun Anggaran 2024 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti sehingga menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao. Meskipun ada beberapa kegiatan yang realisasi anggaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dalam menjalankan pelaksanaan program dan kegiatannya antara lain:

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)
Kekuatan Personil atau Sumber daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas masih terbatas. Kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 2) Masih kurangnya aparatur di Sekretariat terutama dibidang IT yang dibutuhkan sebagai operator.
- 3) Belum seimbang rasio antara tenaga auditor/pengawas dengan objek pemeriksaan yang berjumlah 17 (tujuh

belas) orang yang seharusnya berjumlah 42 (empat puluh dua) orang sehingga masih kurang 28 (dua puluh delapan) orang. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berjumlah 2 (dua) orang dari yang seharusnya 10 (sepuluh) orang dan masih dibutuhkan 8 (delapan) orang lagi. Secara keseluruhan tenaga auditor/pengawas masih kurang 36 (tiga puluh enam) orang.

- 4) Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi pengawasan.

- 5) Kekurangan Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana penunjang pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat saat ini relatif masih terbatas misalnya peralatan untuk pengujian pekerjaan fisik konstruksi, kendaraan operasional pengawasan serta laptop dan printer sebagai penunjang penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

- 6) Biaya operasional Pengawasan belum terpenuhi sesuai standar.

Belum terpenuhinya anggaran penunjang pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan yang dikaitkan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah serta anggaran penunjang pengawasan sesuai kebutuhan yang dikaitkan dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga mempengaruhi output/kinerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.

B. Solusi

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao beberapa point yang dijabarkan berikut diharapkan dapat memberi solusi :

- 1) Mengusulkan penambahan pegawai pada Sekretariat khususnya tenaga IT untuk operator yang saat ini belum ada.
- 2) Mengusulkan penambahan pegawai khususnya pejabat

fungsional auditor maupun fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sehinggaimbang dengan objek pemeriksaan.

- 3) Merumuskan ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan dimana untuk penambahan aparaturnya juga harus disesuaikan tingkat pendidikannya dengan kebutuhan yang ada seperti Sarjana Akuntansi dan Teknik Sipil.
- 4) Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana.
- 5) Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan.
- 6) Agar SDM Inspektorat Kabupaten Rote Ndao menjadi Aparatur yang handal, terampil, kreatif dan inovatif perlu disediakan dana untuk mengikuti diklat teknis sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- 7) Untuk menunjang kelancaran pekerjaan perlu ditambah sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan pemeriksaan.

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi dengan menggunakan alokasi anggaran APBN baik DAK maupun Dana TP dan Dekon. Pada Tahun 2024 pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Inspektorat Kabupaten Rote Ndao sampai saat ini belum pernah melakukan kerjasama antara daerah baik di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Inspektorat Kabupaten Rote Ndao sampai saat ini belum pernah melakukan kerjasama dengan pihak Ketiga.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Inspektorat Kabupaten Rote Ndaotelah melakukan kerjasama dengan Instansi Vertikal, yaitu kerjasama dengan Kepolisian Resort Rote Ndao dan Kejaksaan Negeri Rote Ndao dalam kegiatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dimana diharapkan dengan adanya kerjasama dengan instansi vertikal di daerah, kegiatan pungutan-pungutan liar yang meresahkan masyarakat dapat diminimalisir dan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

BAB VI

PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL DAN TINGKAT PROVINSI

A. Penghargaan Tingkat Nasional

Untuk Tahun 2024 ini penghargaan untuk tingkat nasional pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao belum ada.

B. Penghargaan Tingkat Provinsi

Untuk Tahun 2024 ini penghargaan untuk tingkat provinsi pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao belum ada.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan serta tugas umum pemerintahan.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, secara keseluruhan dinilai telah berjalan dengan cukup baik dan lancar.

B. Saran

Hasil yang telah dicapai pada tahun 2024, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dapat dilaksanakan dan tercapai. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi

perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Inspektorat Kabupaten Rote Ndao ini dapat menjadi bahan bagi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memberikan catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan.

Ba'a, 18 Januari 2025

Inspektur Kabupaten Rote Ndao,



Arkadius H. Lenggu, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19650808 199303 1 011